

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasca berakhirnya masa Perang Dingin, terjadi berbagai perubahan dalam tatanan hubungan internasional. Runtuhnya Uni Soviet beserta paham komunismenya menyisakan Amerika Serikat dengan paham liberalisme nya mendominasi di berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut membuat hubungan antar negara yang sebelumnya bersifat konfliktual berubah menjadi lebih kondusif, sebab ancaman keamanan mulai berkurang dimana tidak ada lagi negara atau blok yang bersitegang dalam persaingan ideologi.

Dengan berakhirnya masa Perang Dingin, isu seputar politik keamanan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hubungan antar negara. Perang Dunia yang selama ini telah menghasilkan berbagai kehancuran dan kerugian membuat negara-negara beralih untuk lebih mengutamakan hubungan penuh perdamaian dibandingkan berkonflik. Hal ini juga berkaitan erat dengan semakin peka nya negara-negara akan interdependensi ekonomi yang berlangsung begitu kuat. Kebutuhan dan tingkat konsumsi masyarakat dunia yang terus berkembang dengan sangat kompleks dan dinamis, membuat aktifitas ekonomi dan perdagangan menjadi sangat vital bagi setiap negara. Sehingga menjalin hubungan yang penuh perdamaian akan lebih

menguntungkan dibandingkan berkonflik, sebab tidak satu negarapun yang benar-benar mampu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari negara lain.

Seiring dengan beralihnya isu keamanan ke isu ekonomi dalam hubungan internasional, fenomena yang tidak kalah penting yaitu Globalisasi. Di dalam era globalisasi ini, siapa saja dapat berinteraksi dengan lebih intensif seolah tidak ada lagi batas-batas geografis negara yang tidak dapat dijangkau (*de-bordering*). Hal tersebut dikarenakan oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat yang menyebabkan telekomunikasi dan transportasi menjadi sangat efisien, sehingga membuat pergerakan manusia menjadi lebih fleksibel, arus barang, jasa, modal, informasi, pengetahuan, dan lainnya juga menjadi lebih cepat dalam bergerak atau berintraksi.

Kemudahan dalam berinteraksi yang ditawarkan oleh globalisasi, serta semakin kuatnya interdependensi ekonomi yang terjadi, mendorong lahirnya aktor-aktor baru dimana negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam hubungan internasional. Dengan munculnya aktor-aktor baru, maka dapat dikatakan bahwa hubungan internasional saat ini tidak lagi bersifat *state centris*. Dalam hubungan yang *non state centris* ini, aktor-aktor dapat berwujud INGO, foundation, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah negara (pemerintah daerah).<sup>1</sup> Tatanan hubungan internasional seperti ini kemudian disebut sebagai *Hubungan Transnasional*.

Hubungan transnasional dapat dipahami sebagai “sebuah interaksi yang melintasi batas-batas geografis negara yang dilakukan oleh aktor-aktor selain negara

---

<sup>1</sup> Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, hal. 4.

dan secara langsung dapat mempengaruhi aktor-aktor lain dari wilayah yang berbeda”. Dalam hubungan internasional yang bersifat transnasional ini, bukan berarti peran negara sepenuhnya hilang, tetapi seiring dengan tuntutan zaman dimana dunia yang semakin mengglobal dan semakin menunjukkan kepekaan akan interdependensi dalam berbagai hal terutama ekonomi, membuat arah kebijakan negara-negara saat ini untuk lebih terbuka dan memberdayakan aktor-aktor lain di dalamnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu aktor yang dapat melakukan hubungan internasional/hubungan luar negeri yang bersifat transnasional ini adalah bagian-bagian dari birokrasi pemerintah negara atau pemerintah daerah. Kapasitas pemerintah daerah untuk dapat melakukan hubungan luar negeri tersebut tidak terlepas dari adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan berbentuk desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan di daerahnya masing-masing. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut menyebabkan adanya pemisahan wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai permasalahan dalam konteks nasional serta menyiapkan berbagai pedoman umum yang dijadikan parameter atau acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tidak menyimpang dari aturan negara. Sedangkan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan serta mengelola berbagai urusan pemerintahan dalam lingkup lokal/di tingkat daerah. Hal inilah yang kerap kali menyebabkan kedua pemerintah tersebut dikategorikan sebagai aktor yang berbeda. Tetapi pada dasarnya antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan, hanya saja dalam hal ini kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat tetaplah berada diatas pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat atas kewenangan yang telah dilimpahkan.

Di dalam wewenang pemerintah daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan di tingkat daerahnya tersebut, termasuk wewenang untuk dapat melakukan hubungan luar negeri. Namun perlu diketahui bahwasanya kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan hubungan luar negeri tersebut pada dasarnya berbeda-beda di setiap negara, karena *share* wewenang/kedaulatan dengan *sub state* dan sistem hukum yang dianutpun berbeda beda. Seperti apa yang dijelaskan oleh Mohtar Mas' oed di pembahasan hubungan transnasional dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi yang menyebutkan bahwa, seringkali bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara berinteraksi langsung dengan bagian-bagian serupa dari birokrasi pemerintah negara lain tanpa sepengetahuan pucuk pimpinan negara-negara terlibat. Hal ini berarti bahwa di beberapa negara, pemerintah daerah mereka dapat secara langsung melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing tanpa melalui perantara atau keterlibatan pemerintah pusat yang merepresentasikan negara.

Di Indonesia sendiri undang-undang yang menjelaskan tentang hubungan luar negeri tertuang dalam UU No.37 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1, ayat (1) disebutkan bahwa; “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha,

organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara”.<sup>2</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa selain pemerintah pusat, aktor lain juga dapat melakukan hubungan luar negeri termasuk pemerintah daerah sebagai *sub state* atau bagian dari negara, dengan begitu dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut memberikan pengakuan atau legalitas bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk dapat melakukan hubungan luar negeri.

Dengan adanya kewenangan Daerah untuk melakukan hubungan luar negeri, berarti bahwa Daerah juga dapat melakukan kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu *sister city/sister province*, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan perundang-undangan.<sup>3</sup> Dari beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh daerah tersebut, salah satu bentuk kerjasama yang marak dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu kerjasama dalam bentuk *sister city*.

Kota Kembar (*sister city*) adalah hubungan kerjasama “kota bersaudara” yang dilaksanakan antara Pemerintah Kotamadya/Daerah Tingkat II, Pemerintah Kota Administratif; dengan pemerintah setingkat di luar negeri.<sup>4</sup> Di Indonesia sendiri, praktik kerjasama *sister city* tercatat yang paling awal adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig, Jerman pada 2

---

<sup>2</sup> Pustakahpi Kemlu, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tentang Hubungan Luar Negeri*, diakses dari [http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir\\_dok/UU-No.37.1999%20-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf](http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/UU-No.37.1999%20-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf), pada tanggal 18 September 2013 pukul 22.12.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, SETNEG, tahun 2004 dalam Takdir Ali Mukti, op.cit, hlm. 3.

<sup>4</sup> Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 107.

Juni 1960.<sup>5</sup> Kemudian seiring perkembangannya, kerjasama internasional dalam bentuk *sister city* ini juga banyak dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang cukup aktif memanfaatkan kapasitasnya untuk melakukan hubungan luar negeri/kerjasama internasional adalah Pemerintah Kota Surabaya. Khususnya dalam melakukan kerjasama *sister city*, saat ini Pemerintah Kota Surabaya tercatat menjalin 5 kerjasama *sister city*, yaitu dengan Kota Seattle (USA), Busan (Korea Selatan), Guangzhou (Tiongkok), Xiamen (Tiongkok), dan Kochi (Jepang).<sup>6</sup> Karena keaktifan dan keseriusan Kota Surabaya dalam menjalin kerjasama *sister city*, maka pada tahun 2010 lalu kota tersebut didaulat sebagai *The Best Practice Sister City and E-Gov* di Indonesia yang dianugerahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dari sekian banyak kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut, salah satu jalinan kerjasama yang menarik yaitu kerjasama dengan Pemerintah Kota Busan di Korea Selatan. Kerjasama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Busan sudah terjalin selama dua puluh tahun sejak penandatanganan MOU (*memorandum of understanding*) antara kedua belah pihak pada 10 November tahun 1994. Kerjasama *sister city* kedua kota tersebut mulai dirintis sejak Kota Surabaya dan Kota Busan dipimpin oleh Walikota Sunarto Sumoprawiro dan Jung Moon Hwa.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 68.

<sup>6</sup> Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya, *Kegiatan Kerjasama Kota Surabaya Dengan Kota Di Luar Negeri*, diakses dari <http://www.surabaya.go.id/eng/pdf/twin/twin.pdf>, pada tanggal 19 September 2014 pukul 13.24.

Kerjasama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Busan mulai dilaksanakan 5 tahun sejak penandatanganan MOU diantara kedua kota dan pelaksanaan kerjasamanya aktif di tahun 2006. Kerjasama *sister city* inipun semakin menunjukkan perkembangan dan keaktifannya dan ditandai dengan adanya peresmian Jalan Surabaya di Kota Busan pada awal tahun 2014 lalu.<sup>7</sup> Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya juga telah meresmikan monumen Korea di Jalan dr. Soetomo Surabaya dimana disitu juga dibangun taman persahabatan kedua kota.

Selain itu pada pertengahan tahun 2014 lalu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Wali Kota Busan, Hur Nam Sik, bersama-sama meresmikan patung Suro dan Boyo di Busan, Korea Selatan. Peresmian patung tersebut menandai 20 tahun kerjasama *sister city* antara kedua kota.<sup>8</sup> “Semoga ke depan hubungan kerjasama ini semakin erat dan sinergi, sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat kedua kota” ucap Ibu Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya saat acara peresmian patung Suro dan Boyo di Busan.<sup>9</sup> Pada 2013 juga telah ditandatangani MOU Pertukaran Persahabatan antara Kedua Parlemen dari Kota Surabaya dan Kota Busan (*Sister Parliament*) yang menginduk pada MOU Kerjasama *Sister City* antara Kota Surabaya dan Kota Busan yang telah dibangun sejak tahun 1994.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Liputan 6, *Hebat! Jalan Surabaya Akan Terpampang di Busan Korea*, diakses dari <http://news.liputan6.com/read/778992/hebatjalan-surabaya-akan-terpampang-di-busan-korea>, pada tanggal 19 September 2014 pukul 20.47.

<sup>8</sup> Kompas, *Risma Resmikan Patung Suro dan Boyo di Korea Selatan*, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2014/07/02/1242564/Risma.Resmikan.Patung.Suro.dan.Boyo.di.Korea.Selatan>, pada tanggal 19 September 2014 pukul 21.03.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Laporan Kegiatan Kerjasama Sister City Surabaya-Busan 2013.

Berdasarkan pemaparan seputar Kerjasama Sister City antara Kota Surabaya dan Kota Busan diatas menjadikannya sebuah topik menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terutama tentang alasan atau kepentingan yang dimiliki oleh kedua kota, selain itu juga tentang apa saja yang dilakukan dalam kerjasama tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan pertanyaan:

“Apa kepentingan Kota Surabaya dalam kerjasama *sister city* dengan Kota Busan dan bagaimana bentuk-bentuk kegiatan kerjasama dari kepentingan tersebut ?”

## **C. Kerangka Teori**

Untuk membantu menjawab rumusan masalah diatas maka akan digunakan konsep dan teori sebagai berikut;

### **1. Konsep *Paradiplomacy***

*Paradiplomacy* mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas ‘*sub-state*’, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.<sup>11</sup>

Atau, *paradiplomacy* merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan institusi

---

<sup>11</sup> Stefan Wolff, *Paradiplomacy: Scope, Opportunities, and Challenges*, University Of Nottingham, 2009, dalam Takdir Ali Mukti, op.cit., hlm. 2.

sub nasional, regional, lokal, (bukan pemerintah pusat), untuk kepentingannya.<sup>12</sup> Pada pembahasan ini, penulis menggunakan konsep *paradiplomacy* untuk mengungkapkan kepentingan apa yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalin kerjasama *sister city* dengan Kota Busan.

Sesuai dengan konsep *paradiplomacy* bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan karena adanya kepentingan yang dimiliki. Kepentingan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemerintah daerah tentunya berbeda-beda, tetapi biasanya kepentingan tersebut terkait erat dengan masalah pembangunan daerah. Dikutip dari buku “Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia”, yang mengatakan bahwa, hubungan dan kerjasama internasional yang dibuat oleh pemda itu sebagian besar akan diorientasikan untuk peningkatan ekonomi daerah dan dukungan terhadap berbagai program kerja di sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.<sup>13</sup> Sebelumnya juga dipaparkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk dapat menjalin interaksi internasional adalah sebagai pintu bagi pemerintah daerah untuk membangun jejaring internasional guna meningkatkan daya saing dan perluasan investasi daerahnya.<sup>14</sup> *Paradiplomacy* atau hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah inipun dapat dilakukan dengan sesama pemerintah daerah setingkat yang berada di luar negeri ataupun dengan institusi swasta asing non pemerintah.

---

<sup>12</sup> Christy Damayanti, *Potensi Paradiplomacy Dalam Mendukung Kinerja Dipomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114777&val=5263>, pada tanggal 10 Oktober 2014 pukul 19.39.

<sup>13</sup> Takdir Ali Mukti, op.cit., hlm. 9.

<sup>14</sup> Takdir Ali Mukti, op.cit., hlm. 8.

Pada pembahasan ini, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki kepentingan tertentu dalam melakukan hubungan luar negeri dalam bentuk kerjasama *sister city* dengan Kota Busan. Kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya dan untuk mengembangkan perekonomian daerah. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kepentingan pemerintah daerah melakukan hubungan luar negeri terkait erat dengan masalah pembangunan daerah, maka dalam hal ini kepentingan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan perekonomian daerah juga merupakan hal yang terkait erat dengan masalah pembangunan daerah sebab kualitas sumber daya manusia dan perekonomian yang baik merupakan salah satu pilar penyokong dalam sebuah pembangunan.

Untuk menyokong pembangunan daerah dan menjadi sebuah kota yang maju, modern serta memiliki daya saing di tengah derasnya arus globalisasi, akan sangat sulit terwujud tanpa diawali dan ditopang oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya sangat serius dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya. Bahkan hal tersebut tergambar jelas dari visi misi Kota Surabaya yaitu “membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia...”.<sup>15</sup>

Dalam kerjasama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Busan, kepentingan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui

---

<sup>15</sup> Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya, *Visi Misi Tujuan dan Sasaran*, diakses dari [www.surabaya.go.id/files.php?id=768](http://www.surabaya.go.id/files.php?id=768), pada tanggal 10 Oktober Januari 2015, pukul 13.48.

sektor pendidikan yang menysasar pada tenaga pengajar dan pelajar. Dibidiknya sektor pendidikan dalam kerjasama tersebut sangatlah beralasan sebab pendidikan merupakan kunci atau jalan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena melalui pendidikanlah penerus bangsa (sumber daya) yang berkualitas dilahirkan serta dibentuk.

Kota Busan dianggap sebagai partner atau mitra yang tepat oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu mencapai kepentingannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya melalui sektor pendidikan. Alasan dibalik itu adalah karena Kota Busan merupakan bagian dari negara Korea Selatan, dimana negara ini sangat maju kualitas pendidikannya. Korea Selatan bahkan menempati urutan pertama sebagai negara dengan sistem pendidikan global terbaik.<sup>16</sup> Maka secara otomatis Kota Busan memiliki kualitas pendidikan yang maju dan baik pula. Dalam proses belajar mengajar siswa sudah dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi sejak dini, pemerintah memberikan fasilitas yang sangat baik dalam sektor pendidikan. Tidak heran jika Korea Selatan bertransformasi menjadi negara maju sebab ditunjang oleh mutu pendidikan yang baik sehingga menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik pula.

Kepentingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya pada bidang pendidikan yang menysasar tenaga pegajar dan pelajar. Kepentingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga menysasar kepada peningkatkan kualitas sumber daya aparat pemerintah

---

<sup>16</sup> BBC, *Sistem Pendidikan Korsel Teratas di Dunia*, diakses dari [www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/05/140508\\_pendidikan\\_peringkat](http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/05/140508_pendidikan_peringkat), pada tanggal 11 Oktober 2014 pukul 18.05

Kota Surabaya baik itu para pegawai maupun para pejabat daerah. Peningkatan kualitas sumber daya aparat pemerintah di daerah juga merupakan *point* yang sangat penting untuk dapat mewujudkan sebuah pembangunan kota yang maju, modern, dan memiliki daya saing, sebab dengan kualitas sumber daya aparat pemerintahan yang baik dalam artian memiliki kualitas intelektual dan wawasan yang luas, maka dapat menghasilkan kinerja yang baik pula terutama dalam mengelola sebuah kota.

Kota Busan yang bernama resmi Busan Metropolitan City merupakan kota yang sangat maju dan mencerminkan sebuah kota modern sehingga sangat cocok untuk dijadikan rujukan dalam membangun dan mengelola Kota Surabaya. Sarana dan prasarana kota serta infrastruktur Kota Busan sangatlah baik sehingga layak untuk disebut sebagai kota metropolitan kelas dunia. Terdapat banyak sekali fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakatnya dan tidak tanggung-tanggung keberadaan fasilitas publik tersebut didukung oleh bangunan dan fasilitas modern. Penggunaan teknologi canggih di kota ini juga diaplikasikan hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam lalu lintas, transportasi, sistem keamanan masyarakat, hiburan dan sebagainya. Pengelolaan kota yang begitu baik inilah yang ingin dipelajari oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan melihat kepada kepentingan yang dimiliki oleh Kota Surabaya serta dengan melihat pada kemajuan sistem pendidikan dan tata kelola perkotaan di Kota Busan, Pemerintah Kota Surabaya meyakini melalui kerjasama *sister city* dengan Kota Busan maka akan dapat membantu Kota Surabaya untuk mencapai kepentingannya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya. Melalui kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan *studi*

*banding* dan belajar tentang bagaimana penerapan sistem pendidikan yang baik serta menambah wawasan aparat pemerintah dalam bagaimana mengelola perkotaan yang baik sehingga bisa mewujudkan Kota Surabaya menjadi kota yang lebih maju, modern dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kemudian kepentingan lain Pemerintah Kota Surabaya dalam kerjasama *sister city* dengan Kota Busan juga adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah. Kepentingan untuk mengembangkan perekonomian daerah ini sesuai dengan apa yang dipaparkan sebelumnya bahwa hubungan dan kerjasama yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sebagian besar akan diorientasikan untuk peningkatan ekonomi daerah.

Sebagai salah satu kota terbesar sekaligus sebagai salah satu pusat perekonomian terbesar yang ada di Indonesia, tentunya berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah setempat untuk terus mendorong pengembangan perekonomian di wilayahnya ke arah yang lebih baik lagi. Upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah tersebut adalah demi terciptanya kesejahteraan masyarakat mengingat bahwa pemerintah daerah merupakan pemegang kendali atas penentuan kebijakan-kebijakan strategis menyangkut perekonomian di wilayahnya. Meskipun di dalam wilayah Indonesia keberadaan Kota Surabaya sebagai pusat perekonomian tidak terbantahkan lagi, namun Pemerintah Kota Surabaya tidak puas hanya sampai disitu, pemerintah terus mendorong agar kota ini juga mampu bersaing dengan kota-kota besar tingkat dunia.

Dalam kerjasama *sister city* dengan Kota Busan, Pemerintah Kota Surabaya memandang bahwa Kota Busan merupakan partner atau mitra yang tepat untuk

membantu mencapai kepentingannya dalam mengembangkan perekonomian daerah. Hal tersebut sangatlah beralasan mengingat bahwa Kota Busan merupakan pusat perekonomian terbesar di Korea Selatan setelah ibukota negaranya Seoul. Bahkan Kota Busan masuk dalam urutan ke 28 besar *Global Financial Centres Index* (GFCI) yaitu peringkat daya saing dari pusat-pusat keuangan dunia pada tahun 2014.<sup>17</sup> Kota ini juga merupakan salah satu pusat industri terbesar di Korea Selatan. Banyak perusahaan-perusahaan besar bermarkas di kota ini, seperti Renault Samsung Motors, Hanjin Heavy Industries, Happycall Co, Ltd, Korea Technology Finance Corporation dan lainnya. Kota Busan juga merupakan pusat perdagangan penting di negaranya sebab kota ini memiliki pelabuhan besar yang termasuk ke lima besar pelabuhan tersibuk dunia. Bahkan Korea Exchange (KRX) atau Bursa Efek tunggal yang ada di Korea Selatan bermarkas di Busan.

Dengan melihat kepada kepentingan yang dimiliki oleh Kota Surabaya, dan melihat pada kondisi perekonomian Kota Busan yang begitu baik, Pemerintah Kota Surabaya meyakini melalui kerjasama *sister city* dengan Kota Busan maka akan dapat membantu Kota Surabaya untuk mencapai kepentingannya dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. Melalui kerjasama tersebut diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dapat mempromosikan potensi daerahnya sehingga mampu untuk menarik para investor asal Kota Busan dan Korea Selatan pada umumnya, untuk berinvestasi di Kota Surabaya. Selain itu juga diharapkan agar dapat meningkatkan kegiatan perdagangan diantara kedua kota, sebab dengan adanya hubungan kerjasama yang

---

<sup>17</sup> Longfinance, *The Global Financial Centres Index 16*, diakses dari [www.longfinance.net/images/GFCI16\\_22September2014.pdf](http://www.longfinance.net/images/GFCI16_22September2014.pdf), pada tanggal 11 Oktober 2014 pukul 20.11.

terjalin diantara kedua kota maka berarti membuka peluang dan kesempatan bagi aktor-aktor lain/pelaku ekonomi/masyarakat di dalam wilayah mereka masing-masing untuk saling berinteraksi satu sama lain khususnya dalam bidang ekonomi.

Konsep *paradiplomacy* ini digunakan untuk mengetahui kepentingan apa yang dimiliki oleh Kota Surabaya dalam melakukan hubungan luar negeri dalam bentuk kerjasama *sister city* dengan Kota Busan. Yaitu karena adanya kepentingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya dan mengembangkan perekonomian daerah.

## **2. Teori Kerjasama Internasional**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kerjasama internasional, karena dalam tatanan hubungan internasional seperti saat ini, tidak satu negara pun yang mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tanpa menjalin kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama perlu dilakukan sebab adanya saling ketergantungan antar negara akibat dari semakin kompleks dan dinamisnya kebutuhan masyarakat yang tidak melulu dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977, hlm. 19, dalam Zulkifli. 2007. *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*. Tesis diterbitkan. Jakarta:

Mengenai kerjasama internasional, terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh K.J. Holsti, salah satunya adalah “Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.<sup>19</sup> Atau dengan kata lain kerjasama internasional diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih (negara atau aktor internasional lainnya) dengan tujuan untuk mencapai kemajuan bersama serta meraih kepentingan yang hendak dicapai.

Di dalam hubungan internasional yang bersifat transnasional seperti saat ini, aktor *sub state*/pemerintah regional (pemerintah daerah) juga turut serta untuk melakukan kerjasama internasional. Tuntutan zaman mendesak daerah untuk dapat lebih aktif melaksanakan berbagai kerjasama baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dimana diharapkan dari kerjasama tersebut dapat membantu daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingannya.

Sesuai dengan teori kerjasama internasional, ada dua kepentingan atau lebih yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Dalam hal ini antara Kota Surabaya dan Kota Busan sama-sama memiliki kepentingan tertentu yang kemudian kepentingan tersebut dipertemukan atau dibahas dan menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama internasional dalam bentuk *sister city* diantara keduanya. Dalam hal ini kepentingan Kota Surabaya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di

---

Universitas Indonesia, diakses dari [lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674...%20Kerjasama%20internasional.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674...%20Kerjasama%20internasional.pdf), pada tanggal 11 Oktober 2014 pukul 01.07.

<sup>19</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta, Erlangga, 1988, hlm. 652-653

wilayahnya dan mengembangkan perekonomian daerah, sedangkan kepentingan Kota Busan tidak dibahas atau dipaparkan mengingat rumusan masalah yang hanya memusatkan pada pembahasan mengenai kepentingan yang dimiliki oleh Kota Surabaya.

Dari kerjasama internasional *sister city* tersebut juga telah menghasilkan berbagai bentuk-bentuk kegiatan kerjasama, dalam pembahasan ini utamanya terkait dengan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama dari kepentingan yang dimiliki oleh Kota Surabaya yaitu bentuk-bentuk kegiatan kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bidang pengembangan perekonomian daerah.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka hipotesa yang dikemukakan oleh penulis adalah : “Kepentingan Kota Surabaya dalam menjalin kerjasama *sister city* dengan Kota Busan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya dan mengembangkan perekonomian daerah. Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama dari kepentingan Kota Surabaya dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya yaitu pengiriman rutin delegasi pendidikan Kota Surabaya ke Kota Busan, terbentuknya *sister school* dan *sister university* di beberapa sekolah dan universitas yang ada di Kota Surabaya dan Kota Busan, dan pengiriman staf pemerintah ke Kota Busan untuk mengikuti *study visit/study banding*. Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama dari kepentingan

Kota Surabaya dalam bidang pengembangan perekonomian daerah diantaranya yaitu penandatanganan MoU Kerjasama KADIN Kota Surabaya dan Kota Busan, kunjungan delegasi pengusaha Kota Busan di Surabaya, dan penandatanganan MoU kerjasama dalam industri *fashion*.”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan sasaran dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Membahas secara ilmiah tentang Kerjasama Internasional dalam bentuk *Sister City* antara Kota Surabaya dan Kota Busan Korea Selatan.
2. Menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa yang dikemukakan.
3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.
4. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tema dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menetapkan jangkauan penelitian difokuskan pada kepentingan yang dimiliki oleh Kota Surabaya dalam kerjasama *sister city* dengan Kota Busan. Selain itu juga pada bentuk-bentuk kegiatan kerjasama apa saja yang telah berlangsung dari kepentingan Kota Surabaya tersebut. Dalam hal ini, mengingat kerjasama antara Kota

Surabaya dan Kota Busan yang telah berlangsung selama dua puluh tahun, maka kemungkinan data-data terdahulu akan sulit untuk ditemukan, maka penulis menetapkan jangkauan penelitian untuk data-data yang akan diperlukan diambil dari tahun 2012 sampai saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa data yang digunakan adalah data di luar rentan waktu tersebut selama data yang digunakan masih relevan dengan isu yang dibahas.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Data yang bersifat Primer, yaitu melalui wawancara langsung dengan Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya yaitu Bapak Ifron Hady Susanto, S.sos., MIR. mengenai berbagai informasi dan data terkait hubungan kerjasama *sister city* antara Kota Surabaya dan Kota Busan.
2. Data yang bersifat Sekunder, yaitu melalui studi pustaka, jurnal, berbagai situs internet dan berita, koran, laporan, dan data dari berbagai instansi/dinas terkait profil Kota Surabaya dan Kota Busan, perundang-undangan, serta perkembangan kerjasama.

Dengan menggunakan data seperti ini maka dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan karya tulis dan penelitiannya.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah :

- BAB I Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini memaparkan tentang perkembangan isu-isu hubungan internasional dan kaitannya dengan kehadiran pemerintah daerah sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional. Selain itu memaparkan tentang landasan hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah yang terdiri dari berbagai kebijakan dan dasar hukum terkait hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah. Kemudian pada akhir bab ini akan paparkan sekilas tentang sejarah kemunculan kerjasama *sister city* di dunia.
- BAB III Bab ini menguraikan tentang objek penelitian yaitu kondisi/profil Kota Surabaya dan Kota Busan mulai dari sejarah kota, kondisi geografis, kondisi demografis, pemerintahan, kebudayaan, dan simbol-simbol dari kedua kota. Setelah itu akan dipaparkan mengenai kemiripan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Surabaya dan Kota Busan sesuai dengan konsep kerjasama yang diterapkan oleh kedua kota, yaitu kerjasama *sistr city*.

BAB IV Bab ini memaparkan tentang kepentingan yang dimiliki oleh Kota Surabaya dalam kerjasama *sister city* dengan Kota Busan. Selanjutnya akan dipaparkan juga mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang telah berlangsung dalam kerjasama tersebut sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh Kota Surabaya.

BAB V Kesimpulan.